

**RENCANA KERJA
BAPPEDA KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2026**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah, dan bahwa Renstra OPD sebagai rencana 5 (lima) tahunan OPD, harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja OPD.

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan mempertimbangkan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok rancangan RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Kepahiang, April 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kepahiang



M. SALIHIN, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19711216 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2024.....	8
2.1. Permasalahan dan Isu Strategis.....	8
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2024	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	32
3.1 Prioritas Pembangunan Daerah.....	32
3.2 Tujuan Renja Bappeda	34
3.3 Sasaran Renja Bappeda	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
BAB V PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	9
Tabel 2. 2 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kepahiang Tahun 2024	12
Tabel 2. 3 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang	14
Tabel 2. 4 Tugas, Fungsi dan Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang	25
Tabel 2. 5 Sasaran dan Program/Kegiatan Bappeda Kabupaten Kepahiang Tahun 2025	28
Tabel 3. 1 Indikator Tujuan Nilai Sakip Pemerintah Daerah	36
Tabel 3. 2 Tujuan Bappeda.....	37
Tabel 3. 3 Sasaran Bappeda.....	37
Tabel 3. 4 Indikator Kinerja Utama Bappeda.....	37
Tabel 4. 1 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2024	39
Tabel 4. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 25 ayat 2, dimana dalam pasal tersebut diatur tentang tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra OPD, RKPD, Renja OPD dan Pelaksanaan Musrenbang. Diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dalam UU itu juga disebutkan bahwa Renstra OPD sebagai rencana 5 tahunan OPD, harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja OPD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Secara substansi, Renja OPD Bappeda Kabupaten Kepahiang Tahun 2026 ini memuat evaluasi Renja OPD tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan OPD (SPM), Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Tujuan/Sasaran/Arah Kebijakan dan Strategi, serta rumusan rencana Program dan Kegiatan OPD Bappeda Kabupaten Kepahiang Tahun 2026 dan rencana pendanaannya.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kepahiang Tahun 2026 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kabupaten Kepahiang yaitu “Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”. Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Renja juga mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2026. RKPD Kabupaten Kepahiang tahun 2026 mempunyai tema **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi Dasar”** dengan empat prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dengan memanfaatkan Potensi Unggulan Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
2. Peningkatan dan Pemenuhan Infrastruktur Daerah untuk Penguatan Konektivitas Wilayah yang Berkelanjutan dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana
3. Penguatan Pondasi Perekonomian Daerah dengan Memaksimalkan Sumber Daya Alam melalui Pengembangan Sektor Manufaktur, Pariwisata, Pertanian dan Ketahanan pangan
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, Kolaboratif dan akuntabel untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani

Berdasarkan tema dan prioritas daerah tahun 2026 Bappeda mendukung prioritas keempat yaitu Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, Kolaboratif dan akuntabel untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani.

Dalam penyusunannya Renja Bappeda juga mengacu kepada Kebijakan-kebijakan di tingkat Provinsi dan juga nasional, yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Pusat, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri dan RKPD Bappeda Provinsi Bengkulu. Sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Renja Bappeda akan memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dikerjakan oleh Bappeda dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan PD sesuai Tupoksinya, dimana Bappeda mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Selanjutnya Renja BAPPEDA Kabupaten Kepahiang digunakan sebagai

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran BAPPEDA Kabupaten Kepahiang Tahun 2026 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Kepahiang Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja BAPPEDA Kabupaten Kepahiang Tahun 2026 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43490);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192)
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
17. Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No. 03 dan 36 tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah
 27. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 23);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023-2043;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045;
 33. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026;
 34. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
 35. Surat Edaran Nomor: 100.4.4/110/SJ tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Tata Ruang Wilayah;
 36. Surat Edaran Nomor: 000.7.2/074/B/BAPPEDA/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2026;
 37. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Sesuai dengan tema RKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2026 **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi Daerah”** dengan prioritas pembangunan;

Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dengan memanfaatkan Potensi Unggulan Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; Peningkatan dan Pemenuhan Infrastruktur Daerah untuk Penguatan Konektivitas Wilayah yang Berkelanjutan dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana; Penguatan Pondasi Perekonomian Daerah dengan Memaksimalkan Sumber Daya Alam melalui Pengembangan Sektor Manufaktur, Pariwisata, Pertanian dan Ketahanan pangan; dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, Kolaboratif dan akuntabel untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani.

Untuk mendukung prioritas keempat dan sasaran pemerintah daerah Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, Kolaboratif dan akuntabel untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani, maka disusun Rancangan Akhir Renja Bappeda Kabupaten Kepahiang tahun 2026 dengan Maksud sebagai berikut:

1. Tersusunnya dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta untuk menentukan kebijakan untuk masalah perencanaan pembangunan, dan arah kebijakan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Dirumuskannya dokumen perencanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan bagi seluruh penyelenggara di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.
3. Dihasilkannya dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Kepahiang dengan memperhatikan pencapaian indikator kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan potensi daerah untuk mencapai sasaran penilaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi capaian rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian rencana strategis (Renstra), serta menganalisis prospek pembangunan Tahun 2026 dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah.
2. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang di bidang perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, untuk mencapai target-target pembangunan pada tahun rencana serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Renja BAPPEDA Kabupaten Kepahiang Tahun 2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I.	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II.	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2024
	2.1 Permasalahan dan Isu Strategis
	2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda
	2.3 Evaluasi Pemenuhan SPM
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Prioritas Pembangunan Daerah
	3.2 Tujuan Renja BAPPEDA
	3.3. Sasaran Renja BAPPEDA
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V.	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2024

2.1. Permasalahan dan Isu Strategis

BAPPEDA sebagai Perangkat Daerah utama di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan, dalam rangka menjamin terciptanya pembangunan yang efektif, efisien dan bersasaran yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran BAPPEDA sebagai badan yang mengkaji berbagai program dan kegiatan strategis dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan pembangunan, telah menempatkan BAPPEDA sebagai Perangkat Daerah yang strategis dalam lingkungan pemerintahan.

Komitmen BAPPEDA Kabupaten Kepahiang untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan meningkatkan indeks inovasi daerah, berkoordinasi dengan PD untuk meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan secara holistik, tematik dan integratif, spasial dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana esensi dari tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu menuntut seluruh stakeholder yang terkait untuk mampu menyikapi berbagai permasalahan pembangunan yang terjadi. Sehingga dapat merumuskan strategi berdasarkan prioritas pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Bappeda Kabupaten Kepahiang dihadapkan pada hal-hal serupa dalam pelaksanaan tugasnya, baik dari sisi eksternal maupun internal.

Dari sisi eksternal BAPPEDA dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan, diantaranya, pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs), pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masih tingginya prevalensi stunting, tingginya angka kemiskinan, masih belum terpenuhinya infrastruktur dasar sanitasi dan rumah tidak layak huni. Amanat Perpres 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah, membenahi tata kelola, meningkatkan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, daerah diharuskan untuk membentuk BRIDA yang bertugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan untuk membentuk BRIDA yang merupakan perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan,

pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Sampai akhir tahun 2024 tahapan pembentukan Bapperida Kabupaten Kepahiang sudah sampai tahap pandangan umum fraksi atas pembentukan Bapperida.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, diharapkan penurunan kemiskinan, peningkatan indeks modal manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan indikator seperti penurunan kemiskinan menjadi 4,5-5%, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59%, dan pertumbuhan ekonomi menuju 8% pada tahun 2029.

Dari segi internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dituntut kemampuannya untuk menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh Perangkat Daerah, guna terwujudnya sistem perencanaan pembangunan yang baru yang bersifat menyeluruh, terpadu, sistematis dan tanggap terhadap perubahan zaman serta pelaksanaan pembangunan secara serasi, terpadu dan sinergi untuk meningkatnya nilai perencanaan strategis.

Di lihat dari beberapa aspek diatas maka disimpulkan permasalahan yang ada pada Bappeda Kabupaten Kepahiang yang teridentifikasi dan kemudian dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah

POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH	
Belum optimalnya kualitas perencanaan daerah	Masih adanya dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah belum berorientasi hasil	1.	Penyusunan dokumen perencanaan tidak didukung dengan data perencanaan yang valid
		2.	Penyusunan dokumen perencanaan belum didasarkan hasil riset atau kajian terkait pada bidangnya
	Kordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah belum optimal	1.	Penjenjangan kinerja belum menggambarkan bagaimana pola crosscutting kinerja antar bidang/ dengan tugas dan fungsi dari PD yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi
		2.	Belum optimalnya asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan
	Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1.	hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategis dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.
		2.	Monitoring yang dilakukan masih secara manual dan berorientasi pada penyerapan anggaran dan belum mempertimbangkan capaian kinerja <i>outcome</i> yang diperjanjikan dalam dokumen

POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH	
			perencanaan kinerja sehingga capaian kinerja yang direncanakan sebelumnya belum diketahui tingkat ketercapaiannya dan belum bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja kedepan.
		3.	Belum maksimalnya monev kinerja Perangkat Daerah
Masih rendahnya inovasi pada sektor pelayanan publik dan pembangunan daerah	Inovasi belum menjadi perhatian/bagian penting bagi perangkat daerah dalam meningkatkan pelayanan publik	1.	Masih rendahnya motivasi Perangkat Daerah untuk melakukan inovasi dan perbaikan untuk meningkatkan pencapaian nilai inovasi
		2.	Pendampingan pembuatan/pembentukan inovasi belum optimal

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2024

Berdasarkan RKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2024, Bappeda mendukung pencapaian sasaran daerah “ Pemberdayaan Ekonomi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.”. Pada Tahun 2024 ada 4 (empat) prioritas pembangunan yaitu:

1. Pemberdayaan Ekonomi Daerah
2. Pemenuhan kebutuhan Infrastruktur Dasar dengan Memperhatikan Lingkungan Hidup
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang. Bappeda Kabupaten Kepahiang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2024 mendukung prioritas keempat yaitu Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dengan melaksanakan 4 program, 14 kegiatan dan 39 sub kegiatan.

Berikut capaian indikator dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda Kabupaten Kepahiang tahun 2024:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang berisi kegiatan rutin setiap Perangkat Daerah, pada tahun 2024 capaiannya 100% karena pada tahun 2024 sebagian besar kegiatan yang sudah terpenuhi, seperti Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah. Program ini sudah memberikan dukungan untuk meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran dengan ketersediaannya penunjang urusan pada BAPPEDA Kabupaten Kepahiang yang hampir seratus persen terpenuhi dan mendukung terpenuhinya Dokumen SAKIP Bappeda yang tahun 2024 Bappeda Kabupaten Kepahiang memperoleh nilai SAKIP OPD dengan nilai 78,45 atau BB dengan predikat Sangat Baik.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pada tahun 2024 ada tiga indikator yang akan dicapai di program yaitu sasaran Meningkatnya keselarasan sasaran RPJMD dengan sasaran prioritas daerah RKPD, kedua tingkat keselarasan agenda pembangunan RPJPD tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi tahun 2025-2045, dan indikator ketiga tingkat keselarasan permasalahan daerah dengan isu strategis daerah.

Dari tiga indikator semua sudah tercapai seratus persen, dengan terpenuhinya keselarasan antara dokumen RKPD dengan RPJMD, RPJPD Kabupaten dengan RPJPD Provinsi, dan selarasnya permasalahan daerah dengan isu strategis daerah.

Selanjutnya untuk meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan maka perlu dilakukan penguatan terhadap analisa pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Kepahiang, sebagai dasar penentuan target indikator makro daerah tahun berikutnya.

Untuk pengukuran pencapaiannya kinerja per triwulan dan untuk menjamin keselarasan antara perencanaan dan kegiatan, Bappeda Kabupaten menggunakan format laporan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala keterlambatan Perangkat Daerah dalam menyampikan laporan monev yang diperlukan.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai sasaran yaitu Meningkatnya keselarasan sasaran prioritas daerah RKPD dengan sasaran perangkat daerah pada Renja bidang perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang SDA, Bidang infrastruktur dan Bidang Kewlayahan. Untuk tahun 2024 antara RKPD dengan Renja yang disusun sudah selaras. Serratus persen.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2024 mempunyai sasaran Meningkatnya keselarasan kerangka ekosistem riset inovasi daerah terhadap Potensi dan isu strategis daerah, dan meningkatnya peran aktif perangkat daerah dalam mendukung informasi inovasi daerah, pada tahun 2024 prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan inovasi daerah baru mencapai 43 persen dari target 75 persen, sedangkan indeks inovasi daerah tercapai 39,68 dari nilai yang ditargetkan sebesar 50.

Untuk kesiapan pembentukan BRIDA di Kabupaten Kepahiang sesuai amanat Perpres 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Maka untuk meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi daerah perlu dibentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPERIDA). Manfaat pembentukan BAPPERIDA adalah untuk:

- a. Meningkatkan kualitas penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data pembangunan daerah; Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan aparatur perencanaan;
- c. dan Aktualisasi kemampuan ASN.

Sampai akhir tahun 2024 tahapan pembentukan Bapperida Kabupaten Kepahiang sudah sampai tahap pandangan umum fraksi atas pembentukan Bapperida.

Secara keseluruhan Pengukuran kinerja Bappeda tahun 2024 didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kepahiang Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai komponen perencanaan strategis	21	20,32
	Nilai komponen pengukuran kinerja	18	18,33
Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Nilai Indeks Inovasi Daerah	50	39,68

Sasaran yang ditargetkan pertama merupakan indikator sasaran yang diperoleh dari bobot nilai SAKIP Kabupaten yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang memperoleh predikat “B”, hal ini menunjukkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Kepahiang “Baik” dengan ditunjukkan implementasi SAKIP sudah baik dan sebagian unit kinerja utama.

Sasaran ini mempunyai dua indikator yaitu Nilai komponen perencanaan strategis dan Nilai komponen pengukuran kinerja. Pada tahun 2024 Kabupaten kepahiang telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan PK serta dokumen lainnya baik pada tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) maupun pada tingkat PD. Pemerintah Kabupaten Kepahiang melakukan perbaikan PK Tahun 2024 pada sebagian PD, serta menyusun penjenjangan kinerja dan *crosscutting*.

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, untuk indikator sasaran Nilai komponen perencanaan strategis didukung oleh Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, dengan indikator: tingkat keselarasan sasaran RPJMD dengan sasaran prioritas daerah RKPD; tingkat keselarasan agenda pembangunan RPJPD tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi tahun 2025-2045; dan tingkat keselarasan permasalahan daerah dengan isu strategis daerah. Dan Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan indikator tingkat keselarasan sasaran prioritas daerah RKPD dengan sasaran perangkat daerah pada Renja bidang perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia dan Tingkat keselarasan sasaran prioritas daerah RKPD dengan sasaran perangkat daerah pada Renja bidang infrastruktur, SDA dan kewilayahan. Secara keseluruhan indikator pada sasaran ini telah tercapai seratus persen.

Untuk indikator sasaran Nilai komponen pengukuran kinerja didukung oleh indikator program Prosentase capaian kinerja OPD per triwulan terhadap capaian program perangkat daerah pada Program Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Indikator sasaran ini sudah tercapai seratus persen dengan peran aktif dari OPD untuk menyampaikan laporan capaian program perangkat daerah per triwulan sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Pada sasaran kedua meningkatnya indeks inovasi daerah, dengan didukung Program penelitian dan pengembangan daerah, dan indikator program Persentase perangkat daerah yang melaporkan inovasi daerah. Sasaran ini sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dimana tujuan Inovasi Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing Daerah. Dari hasil pemetaan yang telah dilakukan Kabupaten Kepahiang memperoleh Indeks Inovasi Daerah senilai 39,68 dan masuk kategori kabupaten inovatif. Dengan peran dari empat puluh tiga persen OPD yang membuat laporan inovasi daerah.

Tabel 2. 3 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu pada
 sasaran RKPD : *Pemberdayaan Ekonomi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*

NO	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Akhir Periode Tahun 2024			Bobot Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Akhir Periode Tahun 2024				Sisa Anggaran Renja Perangkat Daerah Akhir Tahun Periode 2024	Keterangan
					Target	Satuan	Pagu indikatif (Rp)		Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Pagu Realisasi Anggaran (RP)	Realisasi Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10/6*100	12	13=12/8*100	14=8-12	15
A	Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dalam rangka pencapaian pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan			100	Persentase	8.025.163.870		100	100	7.761.396.483	96,71	263.767.387	Hasil Nilai evaluasi Sakip Kabupaten Kepahiang 60, 31 dengan range nilai B dari Kemenpan RB
		1. Nilai komponen perencanaan strategis	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat keselarasan sasaran RPJMD dengan sasaran prioritas daerah RKPD.	100	Persentase	1.229.690.000		100	100	1.215.912.000	98,88	13.778.000	Terpenuhinya Keselarasan RPJMD, Keselarasan agenda Pembangunan. Nilai Perencanaan kinerja kabupaten Kepahiang Tahun 2024 yaitu 20, 32 dari Kemenpan RB
				Tingkat keselarasan agenda pembangunan RPJPD tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi tahun 2025-2045										
				Tingkat keselarasan permasalahan daerah dengan isu strategis daerah										
			Kegiatan Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Jumlah berita acara musrenbang kabupaten	1	Berita Acara	1.100.882.000				1.100.812.000	99,99	70.000	Tersediannya berita acara musrenbang kabupaten tahun 2025 dan 5 dokumen

				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5	dokumen								perencanaan pembangunan kabupaten/kota
			Sub kegiatan Pelaksanaan musrenbang	Jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota	1	Berita Acara	176.970.000		1	100	176.900.000	99,96	70.000	Berita Acara Musrenbang Kab Kepahiang Tahun 2025
			Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5	dokumen	923.912.000		5	100	923.912.000	100,00	0	Dokumen RPJD, RPJMD, RPJMD Teknokratik, RKPD 2025, RKPD perubahan 2024
			Kegiatan Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	1	Buku	61.290.000		1	100	60.630.000	98,92	660.000	Tersediannya Buku Profil Pembangunan daerah kabupaten Kepahiang
			Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	Buku	61.290.000		1	100	60.630.000	98,92	660.000	Buku Profil Pembangunan daerah kabupaten Kepahiang
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan sasaran prioritas daerah dengan sasaran strategis perangkat daerah di bidang perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia	100	Persentase	786.665.000		100	100	747.774.916	95,06	38.890.084	terpenuhinya keselarasan prioritas daerah dengan sasaran strategis perangkat daerah bidang

				Tingkat keselarasan sasaran prioritas daerah dengan sasaran strategis perangkat daerah di bidang infrastruktur, SDA dan Kewilayahan										pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan . Nilai Perencanaan kinerja kabupaten Kepahiang Tahun 2024 yaitu 20, 32
			Kegiatan Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen	269.014.000		4	100	249.855.500	92,88	19.158.500	Tersedianya Dokumen RKPD Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, dokumen LPK2KD dan Dokumemn stunting
			Sub kegiatan Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	113.027.000		2	100	107.200.500	94,85	5.826.500	Dokumen RKPD 2025 bidang pemerintahan, Dokumen LPK2KD
			Sub kegiatan Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	155.987.000		2	100	142.655.000	91,45	13.332.000	Dokumen RKPD 2025 Pembangunan Manusia, Dokumen Stunting
			Kegiatan Koordinasi perencanaan bidang perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA yang dikoordinir	4	Dokumen	249.973.000		4	100	243.037.236	97,23	6.935.764	Tersedianya Dokumen RKPD Bidang Perekonomian dan SDA tahun

			dan SDA	penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										2025, RKPD perubahan tahun 2024 Bidang SDA, Dokumen SDGS
			Sub kegiatan Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	154.990.000		2	100	152.610.000	98,46	2.380.000	Dokumen RKPD 2025 bidang perekonomian, Dokumen SDGS
			Sub kegiatan Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	94.983.000		2	100	90.427.236	95,20	4.555.764	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA tahun 2025 dan dokumen Perubahan RKPD 2024
			kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan.	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	dokumen dan laporan	267.678.000		5	100	254.882.180	95,22	12.795.820	Terpenuhinya dokumen pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan tahun 2025, dokumen perubahan RKPD tahun 2024 dan Laporan monitoring kabupaten Kepahiang tahun 2024

			Sub kegiatan Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	119.888.000		2	100	114.808.780	95,76	5.079.220	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur tahun 2025 dan dokumen Perubahan RKPD 2024
			Sub kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur.	1	Laporan	62.822.000		1	100	58.960.400	93,85	3.861.600	laporan monitoring infrastruktur kabupaten kepahiang tahun 2024
			Sub kegiatan Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	84.968.000		2	100	81.113.000	95,46	3.855.000	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan tahun 2025 dan dokumen Perubahan RKPD 2024
		2. Nilai komponen pengukuran kinerja	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja OPD per triwulan terhadap capaian program perangkat daerah	100	Persentase	67.518.000		1	100	54.470.000	80,67	13.048.000	Terpenuhinya Laporan Evaluasi Capaian Kinerja OPD Kabupaten Kepahiang. Nilai Pengukuran kinerja Kabupaten Kepahiang yaitu 18, 33 dari Kemipan RB
			kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1	Laporan	67.518.000		1	100	54.470.000	80,67	13.048.000	Tersediannya Laporan Evaluasi Capaian Kinerja OPD Kabupaten Kepahiang

			pembangunan daerah											
			Sub kegiatan Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	1	Laporan	67.518.000		1	100	54.470.000	80,67	13.048.000	Laporan Evaluasi Capaian Kinerja OPD Kabupaten Kepahiang
		Meningkatnya kinerja Perencanaan Pembangunan												
		Nilai indeks inovasi daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase perangkat daerah yang melaporkan inovasi daerah.	100	Persentase	136.928.000		100	75	123.140.000	89,93	13.788.000	indeks inovasi kabupaten kepahiang 39,68 penilaian dari Kemendagri
			kegiatan Pengembangan inovasi dan teknologi.	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	Dokumen	136.928.000		1	100	123.140.000	89,93	13.788.000	Tersediannya dokumen RIJPID
			Sub Kegiatan Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif.	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	Dokumen	136.928.000		1	100	123.140.000	89,93	13.788.000	Dokumen RIJPID
		Meningkatnya tata kelola Administrasi perkantoran	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaannya penunjang urusan pemerintahan pada BAPPEDA	100	Persentase	5.871.880.870		100	100	5.674.569.567	96,64	197.311.303	Tersediannya penunjang BAPPEDA. Nilai SAKIP OPD 78,45 dari Inspektorat kabupaten kepahiang
			Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan	Tingkat ketersediaannya dokumen perencanaan dan pelaporan			202.925.600				186.339.900		16.585.700	Tersediannya Dokumen Perencanaan,

			an Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja BAPPEDA
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	laporan	202.925.600		9	100	186.339.900	91,83	16.585.700	Cetak dokumen dan Laporan SKPD bappeda (RKA 2024 , DPAA 2024,PK, Lakip , Renja, Renstra, RKKA 2024, DPPA 2024 dan laporan keuangan tahun 2024)
			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	Orang	3.356.692.482		29	100	3.206.576.881	95,53	150.115.601	sudah tepenuhi gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	Orang	3.356.692.482		29	100	3.183.844.656	94,85	172.847.826	sudah tepenuhi gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan penyediaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	28	Orang	177.125.000		35	125	172.100.000	97,16	5.025.000	pelaksanaan bimtek BAPPEDA
			Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28	Orang	177.125.000		35	125	172.100.000	97,16	5.025.000	sudah dilaksanakan 34 orang bimtek dan 1 orang PIM II (Kabid Fispra)
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaannya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	Persentase	50.998.200		100	100	43.988.161	86,25	7.010.039	terpenuhinya ketersediaannya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	11.998.200		1	100	11.990.000	99,93	8.200	sudah digunakan 1199 buah materai

			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	39.000.000		1	100	31.998.161		7.001.839	sudah terpenuhi Sumber Daya Air dan Listrik Bappeda
			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaannya pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100	Persentase	1.468.460.900		100	100	1.458.495.521	99,32	9.965.379	terpenuhinya ketersediaannya pelayanan Administrasi Umum Perkantoran
			Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pemenuhan ATK, alat Kebersihan, makan minum dan tenaga honorer	4	Paket	719.577.200		4	100	710.087.200	98,68	9.490.000	terpenuhi Bahan Logistik Kantor
			Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10	Paket	69.000.000		10	100	68.996.000	99,99	4.000	Sudah tepenuhi Barang Cetak dan Penggandaan
			Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	55.695.700		1	100	55.694.000	100,00	1.700	sudah tepenuhi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto
			Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	15.000.000		12	100	15.000.000	100,00	0	sudah terpenuhi Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket	9.999.000		10	100	9.900.000	99,01	99.000	sudah terpenuhi Peralatan Rumah Tangga
			Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5	dokumen	92.600.000		5	100	92.600.000	100,00	0	tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	506.589.000		86	172	506.218.321	99,93	370.679	terlaksannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 86 laporan

			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah ketersediaanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor			226.483.688				224.350.000		2.133.688	terpenuhinya ketersediaanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
			Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	unit	60.000.000		12		59.350.000	98,92	650.000	Belanja Ac 6 unit, 6 belanja Personal Computer (PC)
			Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	unit	166.483.688		3		165.000.000	99,11	1.483.688	Sudah dilaksanakan Mebel (kursi pejabat)
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan sarana dan prasaran kantor dalam kondisi baik	100		389.195.000				382.719.104	98,34	6.475.896	Terpenuhinnya ketersediaan sarana dan prasaran kantor dalam kondisi baik
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	240.250.000		4		233.815.104	97,32	6.434.896	Sudah Terpenuhi Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantordan Bangunan
			Sub Kegiatan : Penyediaan JasaPemeliharaan , BiayaPemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	unit	75.445.000		19		75.440.000	99,99	5.000	Sudah Terpenuhi JasaPemeliharaa n, BiayaPemelihara an dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	unit	73.500.000		50		73.464.000	99,95	36.000	Sudah Terpenuhi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Renja Bappeda tahun 2024 disusun untuk meraih target sasaran yang ditetapkan untuk mendukung visi misi pemerintah daerah. Pada tahun 2024 Bappeda Kabupaten Kepahiang mendukung pencapaian sasaran daerah *“Pemberdayaan Ekonomi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”* dengan prioritas daerah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pada tahun 2024 ada dua sasaran yang akan dicapai oleh Bappeda Kabupaten Kepahiang yaitu:

Sasaran Pertama, Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dengan Indikator Nilai komponen perencanaan strategis dari target 21 terealisasi senilai 20,32 dengan didukung oleh program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Untuk pencapaian program, kegiatan dan Sub Kegiatan secara keseluruhan sudah terlaksana. Pada Indikator Nilai komponen pengukuran kinerja dengan target 18 tercapai nilai 18,33 yang didukung oleh oleh program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Sasaran kedua Meningkatnya indeks inovasi daerah dengan indikator Prosentase Nilai indeks inovasi daerah pada tahun 2024 dari target 50 terealisasi senilai 39,68 yang didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Ada sebelas dari 26 Perangkat Daerah yang berperan dalam inovasi daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda dalam memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah berkaitan dengan peran BAPPEDA diluar tupoksi dari isu strategis yang ada diantaranya yaitu:

1. Sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BAPPEDA sebagai leading sektor sangat diperlukan dalam intervensi

pencegahan stunting dan berperan sebagai koordinator yang menyelaraskan fokus program antar OPD terkait penanganan stunting di wilayahnya.

2. BAPPEDA sebagai sekretaris dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) berperan untuk menyiapkan rencana pengentasan kemiskinan kabupaten.
3. BAPPEDA sebagai pejabat perencana daerah sehingga berperan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4. Peraturan Presiden nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan untuk membentuk BRIDA yang merupakan perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

Tabel 2. 4 Tugas, Fungsi dan Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang

Tugas	Fungsi	Peran
Mengkoordinir, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perencanaan penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.	a. penyusunan rencana program kerja pada Badan PerencanaanPembangunan Daerah; b. penyusunan petunjuk teknis dalam bidang tugasnya; c. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang perencanaan pembangunan daerah d. perumusan program kegiatan penelitian dan perencanaanpembangunan daerah; e. pengkoordinasian program kegiatan penelitian dan perencanaanpembangunan Daerah; f. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah; g. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan; h. pemberian pembinaan, pengarahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan; i. pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas badan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah; j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan k. penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya	1. Sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BAPPEDA sebagai leading sector sangat diperlukan dalam intervensi pencegahan stunting dan berperan sebagai koordinator yang menyelaraskan fokus program antar OPD terkait penanganan stunting di wilayahnya. 2. BAPPEDA sebagai sekretaris dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) berperan untuk menyiapkan rencana kemiskinan kabupaten. 3. BAPPEDA sebagai pejabat perencana daerah sehingga berperan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah 4. Bappeda berperan penting dalam Satu Data Indonesia (SDI) sebagai koordinator di tingkat daerah. 5. BAPPEDA sebagai perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda dihadapkan pada permasalahan-permasalahan, yaitu:

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan daerah
2. Masih rendahnya inovasi pada sektor pelayanan publik dan pembangunan daerah

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Dilihat dari permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi Bappeda mendatang adalah:

- Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Lambatnya peningkatan nilai IPM dan laju pertumbuhan ekonomi
- Persentase kemiskinan yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Bengkulu (Peringkat ke 6 tertinggi Kab/ Kota Se Provinsi Bengkulu tahun 2024)
- Belum adanya aplikasi e-monev dan aplikasi untuk pengukuran kinerja individu.
- Masih kurangnya peran Perangkat Daerah dalam melakukan inovasi.

Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan ketugasannya adalah:

- Berdasarkan Surat dari Badan Riset Nasional, mewajibkan bahwa setiap daerah harus mempunyai Badan Riset dan Inovasi Daerah tersendiri yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- Sampai akhir tahun 2024 tahapan pembentukan Bapperida Kabupaten Kepahiang sudah sampai tahap pandangan umum fraksi atas pembentukan Bapperida

Isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun selanjutnya adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk penguatan Ekonomi daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2026 mempunyai tema “ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk penguatan Ekonomi daerah.” Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2026. Adapun prioritas yang ada pada RKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2026 yaitu:

1. Revitalisasi dan Penataan Kawasan Lapangan Santoso sebagai Ikon Pusat Kota Kepahiang
2. Intensifikasi dan Modernisasi Pengelolaan dan Pengembangan Sektor Pertanian
3. Hilirisasi dan Peningkatan Mutu Produk Unggulan Daerah
4. Peningkatan Infrastruktur Dasar Bidang Pendidikan dan Kesehatan
5. Program Kegiatan Penurunan Stunting Berkelanjutan dan Target Zero Stunting di Akhir RPJMD
6. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem "0" Persen
7. Pro Investasi Dengan Tetap Mengedepankan UMKM
8. Pengembangan Sektor Pariwisata Andalan dan Revitalisasi Sektor Kepariwisata
9. Melanjutkan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Konektivitas Wilayah sehingga Mendukung Pertumbuhan Sektor Perekonomian
10. Revitalisasi dan Pembangunan Kawasan Wisata Religius Masjid Agung dan Sekitarnya
11. Peningkatan dan Optimalisasi Sektor Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
12. Menggali, Memaksimalkan Potensi dan Memanfaatkan Peluang PAD sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah
13. Penyelenggaraan Program Pelayanan Kolaboratif Menuju Layanan yang Prima, Mudah, Cepat dan Gratis
14. Revitalisasi Pasar Rakyat untuk Peningkatan Sarana Prasarana Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
15. Optimalisasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
16. Pengembangan Ekonomi Mikro Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Program Pengembangan Bantuan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kepahiang dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Bappeda. Penyusunan program kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan tahun 2026 yang diharapkan bisa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Kepahiang dan memenuhi amanat dari peraturan dan kebijakan yang ada. Diantaranya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, meningkatkan nilai pengukuran kinerja Kabupaten Kepahiang dan untuk mengoptimalkan kinerja pada Bappeda Kabupaten Kepahiang.

Tabel 2. 5 Sasaran dan Program/Kegiatan Bappeda Kabupaten Kepahiang Tahun 2025

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Program Prioritas Daerah	Program PD	Sasaran Program	Kegiatan PD	Sasaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	PD Kontributor
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Peningkatan standart pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, keuangan, dan penerapan <i>e-government</i> serta penegakan supremasi hukum	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya keselarasan sasaran RPJMD dengan sasaran prioritas daerah RKPD	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya musrenbang kabupaten/kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota	BAPPEDA
								Terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	BAPPEDA
							Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terbinanya Perangkat Daerah dalam pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	BAPPEDA
								Terlaksananya analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	BAPPEDA
							Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	BAPPEDA

							Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terkelolanya Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	BAPPEDA
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya keselarasan sasaran prioritas daerah RKPD dengan sasaran perangkat daerah pada renja bidang perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPEDA
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPEDA
							Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPEDA
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPEDA

									RPJMD dan RKPD)		
							Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPEDA
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastrukturu	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur.	BAPPEDA
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	BAPPEDA
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPEDA

2	Penguatan dan pengembangan inovasi daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Inovasi Daerah		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya peran aktif perangkat daerah dalam mendukung informasi inovasi daerah.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terfasilitasinya, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	BAPPEDA
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif.	Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif.	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	BAPPEDA

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, memiliki tema "Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif". RKP ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui akselerasi hilirisasi sumber daya alam, percepatan pengentasan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas di berbagai sektor. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 memiliki target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%. beberapa sasaran pembangunan RKP 2026 ialah *Gross National Income* (GNI) per kapita 5.870 dolar Amerika Serikat (AS), penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) 37,14 persen, indeks kualitas lingkungan hidup 76,67 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 6,5-7,5 persen, rasio gini 0,377-0,380, serta indeks modal manusia 0,57. Untuk sasaran pertumbuhan ekonomi Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2026 masing-masing 6,1 persen dan 7,1 persen

RKP ini akan fokus pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. RKP 2026 juga akan mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai RKP 2026 Bappenas:

- Target Pertumbuhan Ekonomi: 6,3%.
- Fokus Pembangunan: Berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Implementasi: RPJMN 2025-2029.
- Pra-Musrenbangnas: Bappenas menggelar Pra-Musrenbangnas Bidang Infrastruktur sebagai bagian dari proses penyusunan RKP 2026.
- Finansial Infrastruktur: High Level Meeting & Special Session: Infrastructure Financing Pra-Musrenbangnas RKP 2026 membahas mengenai pembiayaan infrastruktur.
- Prioritas Pembangunan: RKP 2026 akan merumuskan prioritas pembangunan yang lebih spesifik dalam berbagai bidang, termasuk infrastruktur.

Pendekatan penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2026 terbaru menekankan pada peningkatan produktivitas untuk swasembada pangan dan energi, serta percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Ini melibatkan akselerasi hilirisasi sumber daya alam, pengentasan kemiskinan, dan berbagai strategi seperti peningkatan produktivitas industrialisasi, pertanian, dan teknologi.

RKP 2026 disusun dengan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) untuk mengoptimalkan peran *non state actors* dalam pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan investasi swasta, merangkul dan memberdayakan

masyarakat, serta mendorong inovasi dan Solusi baru untuk percepatan pembangunan. RKP menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD.

Amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Presiden nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan untuk membentuk BRIDA yang merupakan perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Provinsi Bengkulu tahun 2026 disusun berdasar visi, misi, dan program pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan arah pembangunan Bengkulu tetap berpijak pada visi “Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

RKPD Provinsi Bengkulu tahun 2026 disusun melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang mengangkat tema ***“Membangun Ekonomi Bengkulu Berbasis Keunggulan Lokal Melalui Peningkatan SDM, Ketahanan Pangan, Pembangunan Infrastruktur, dan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif”***. Dengan prioritas utama dalam RKPD 2026 Bengkulu masih difokuskan pada penguatan infrastruktur, terutama jalan dan irigasi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun Isu strategis yang menjadi perhatian utama, seperti:

- Tata kelola pemerintahan yang belum optimal
- Ketahanan pangan yang masih lemah
- Daya saing ekonomi rendah akibat belum optimalnya hilirisasi
- Ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan
- Minimnya perlindungan lingkungan dan mitigasi bencana

Fokus utama pembangunan Provinsi Bengkulu pada tahun 2026 adalah pembenahan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi daerah yang berbasis potensi lokal. Beberapa proyek strategis yang menjadi fokus adalah Jalan Tol Bengkulu-Lubuk Linggau Tahap II, pengembangan Kawasan Wisata Danau Dendam Tak Sudah (DDTS), dan revitalisasi Kebun Binatang Taman Remaja. Selain itu, juga terdapat program Cetak Sawah Baru, Program Perumahan Terintegrasi, dan program Makan Bergizi untuk Ibu dan Anak. Dengan sasaran makro pembangunan tahun 2026 ditargetkan sebagai berikut:

- Tingkat kemiskinan: 11,50–12,52%
- Pengangguran: 4,62–5,30%
- Pertumbuhan ekonomi: 4,62–5,30%

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 74,91
- Gini Ratio: 0,315–0,322

Agar tujuan dan sasaran pembangunan tercapai secara efektif, efisien dan tepat sasaran ke masyarakat maka membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan integrasi antara pemangku kepentingan baik di pusat, provinsi, dan kabupaten.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diantaranya adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota terutama pada lintas batas untuk mencapai keserasian pembangunan daerah sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Kepahiang umumnya melibatkan pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Ini berarti melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perangkat daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan. RKPD 2026 akan menjadi dasar penting untuk mengarahkan pembangunan di Kepahiang selama tahun 2026, dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Sehingga RKPD 2026 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang efektif dan akuntabel, serta dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah Kepahiang.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Bappeda

Penyusunan Renja Bappeda tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepahiang 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Dokumen RPJMD Kabupaten Kepahiang tahun 2025-2029.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi Daerah”. Rencana Kerja Bappeda merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2026. Maka visi Bappeda Kabupaten Kepahiang itu harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.

Dengan semangat itu, maka Bappeda Kabupaten Kepahiang untuk tahun 2026 akan mendukung terwujudnya visi :**“Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**. Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk

mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia. Sebagai bentuk untuk mewujudkan visi tersebut, maka Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia dan Penguatan Kohesivitas Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat Madani yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Fondasi Perekonomian Daerah dengan Memaksimalkan SDA Berbasis Potensi Unggulan dan Karakteristik Daerah;
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Air dan Pangan serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim;
5. Mewujudkan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis serta Penguatan Konektivitas Wilayah yang Memadai, Berkualitas dan Berkelanjutan.

Selain visi dan misi, pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kepahiang juga didasarkan tema RKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2026 “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi Daerah”. dengan 16 (enam belas) Program prioritas pembangunan yaitu:

1. Revitalisasi dan Penataan Kawasan Lapangan Santoso sebagai Ikon Pusat Kota Kepahiang
2. Intensifikasi dan Modernisasi Pengelolaan dan Pengembangan Sektor Pertanian
3. Hilirisasi dan Peningkatan Mutu Produk Unggulan Daerah
4. Peningkatan Infrastruktur Dasar Bidang Pendidikan dan Kesehatan
5. Program Kegiatan Penurunan Stunting Berkelanjutan dan Target Zero Stunting di Akhir RPJMD
6. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem "0" Persen
7. Pro Investasi Dengan Tetap Mengedepankan UMKM
8. Pengembangan Sektor Pariwisata Andalan dan Revitalisasi Sektor Kepariwisata
9. Melanjutkan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Konektivitas Wilayah sehingga Mendukung Pertumbuhan Sektor Perekonomian
10. Revitalisasi dan Pembangunan Kawasan Wisata Religius Masjid Agung dan Sekitarnya

11. Peningkatan dan Optimalisasi Sektor Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
12. Menggali, Memaksimalkan Potensi dan Memanfaatkan Peluang PAD sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah
13. Penyelenggaraan Program Pelayanan Kolaboratif Menuju Layanan yang Prima, Mudah, Cepat dan Gratis
14. Revitalisasi Pasar Rakyat untuk Peningkatan Sarana Prasarana Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
15. Optimalisasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
16. Pengembangan Ekonomi Mikro Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Program Pengembangan Bantuan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Bappeda tahun 2026 disesuaikan dengan tupoksi Bappeda dan prioritas pembangunan yang kesatu dan keempat maka tujuan yang akan dicapai yaitu **meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam rangka pencapaian pemerintah yang baik dan bersih**, dengan indikator tujuan Nilai SAKIP pemerintah daerah yang dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Indikator Tujuan Nilai Sakip Pemerintah Daerah

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran OPD	Indikator sasaran OPD (outcome)
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, Kolaboratif dan akuntabel untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai komponen perencanaan strategis
				Nilai komponen pengukuran kinerja
2.	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dengan memanfaatkan Potensi Unggulan Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Daya Saing Pembangunan	Nilai Indeks Inovasi Daerah

Berikut hubungan antara tujuan OPD dengan sasaran OPD yang disajikan pada tabel 3.2.dan tabel 3.3.

Tabel 3. 2 Tujuan Bappeda

No	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target Kinerja Tujuan OPD Tahun 2026
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam rangka pencapaian pemerintah yang baik dan bersih	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja Pembangunan Daerah
			Meningkatnya daya saing pembangunan Daerah

Tabel 3. 3 Sasaran Bappeda

No	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Target Sasaran OPD Tahun 2026
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengukuran kinerja Pembangunan Daerah	Nilai komponen perencanaan strategis	21
		Nilai komponen pengukuran kinerja	19
2.	Meningkatnya Daya Saing Pembangunan Daerah	Nilai Indeks Inovasi Daerah	45

Tabel 3. 4 Indikator Kinerja Utama Bappeda

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Penjelasan/Formula	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengukuran kinerja Pembangunan Daerah	Nilai komponen perencanaan strategis	Sub Komponen 1(Keberadaan) + Sub Kkomponen 2(Kualitas) + Sub Komponen 3 (Pemanfaatan)	Surat KermenPAN RB RI tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
		Nilai komponen pengukuran kinerja	Sub Komponen 1(Keberadaan) + Sub Kkomponen 2(Kualitas) + Sub Komponen 3 (Pemanfaatan)	Surat KermenPAN RB RI tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2.	Meningkatnya Daya Saing Pembangunan Daerah	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah $= \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100\%$	Surat Keputusan Kemendagri tentang Indeks Inovasi Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan di Bappeda Kabupaten Kepahiang didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
2. Prioritas pembangunan
3. Pencapaian SDGs
4. Pengurangan kemiskinan
5. Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)
6. Pencapaian IKU
7. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Berdasarkan pencapaian visi dan misi kepala daerah, Bappeda Kabupaten Kepahiang mendukung misi ke-3 Bupati yaitu **Mewujudkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**. Sedangkan berdasarkan RKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2026 yang mempunyai tema “**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi Daerah**” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dengan memanfaatkan Potensi Unggulan Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
2. Peningkatan dan Pemenuhan Infrastruktur Daerah untuk Penguatan Konektivitas Wilayah yang Berkelanjutan dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana
3. Penguatan Pondasi Perekonomian Daerah dengan Memaksimalkan Sumber Daya Alam melalui Pengembangan Sektor Manufaktur, Pariwisata, Pertanian dan Ketahanan pangan
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, Kolaboratif dan akuntabel untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani

Program/kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2025 dan sasaran OPD mendukung prioritas keempat pada RKPD Kabupaten Kepahiang 2026, dengan rincian pada tabel 4.1

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2026

N o	Prioritas Pembanguna n	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, Kolaboratif dan akuntabel untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	750.000.000	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	500.000.000	
		Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten	200.000.000	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	150.000.000	
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	100.000.000	
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100.000.000	
		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100.000.000	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	650.000.000	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	250.000.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	125.000.000,00	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	125.000.000,00	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	200.000.000	

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.000.000,00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.000.000,00	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	90.000.000,00	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	90.000.000	
	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	90.000.000	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	900.000.000,00	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	200.000.000,00	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	200.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	180.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	180.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	420.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	220.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	200.000.000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100.000.000	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	100.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.300.482.868	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	164.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.490.967.868	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.490.967.868,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.250.000	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.250.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.046.385.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	480.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	85.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	353.385.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.000.000	
	Pengadaan Mebel	50.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.880.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	246.880.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	

Rumusan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kepahiang tahun 2026 mencakup 4 program yang terdiri 17 kegiatan dan 33 sub kegiatan dan prakiraan maju tahun 2027 untuk sumber dana APBD Kabupaten Kepahiang, secara detail dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KEPAHIANG TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					7.690.482.868,00						8.148.500.000,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7.690.482.868,00							8.148.500.000,00	
	5.01	PERENCANAAN						6.790.482.868,00							7.158.500.000,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	-			-	5.300.482.868,00						-	5.518.500.000,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	164.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-	-	180.000.000,00	BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	164.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-		180.000.000,00	BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.490.967.868,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-	-	3.500.000.000,00	BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											ASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/ bulan	3.490.967.868,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerinta n yang Adaptif dan Melayani	-		3.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	150.250.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerinta n yang Adaptif dan Melayani	-	-	165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				28 Orang	150.250.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerinta n yang Adaptif dan Melayani	-		165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.046.385.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerinta n yang Adaptif dan Melayani	-	-	1.199.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerinta n yang Adaptif dan Melayani	-		33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	18.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	10.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	480.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	-		580.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	70.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	-		77.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	-		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	DAERAH				
											NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				108 Laporan	353.385.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	-		388.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	110.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	-	-	121.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	-		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	60.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	-		66.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	62.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-	-	68.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintahan an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-		8.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	54.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintahan an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	276.880.000,00			-	-	-	-	285.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			-				-	246.880.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	30.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintahan an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-		35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM- POK SASAR- AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN- G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	840.000.000,00						-	925.000.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	500.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-	-	550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	200.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-		220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-		330.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-	-	165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				26 Orang	100.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM- POK SASAR- AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 20	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKA- TIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	50.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi Pemerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-		55.000.00 0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	90.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi Pemerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-	-	100.000.0 00,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	90.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi Pemerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-		100.000.0 00,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi Pemerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-	-	110.000.0 00,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi Pemerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-		110.000.0 00,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	650.000.000,00						-	715.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	250.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-	-	275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-		137.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-		137.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-	-	220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan Peningkata n Kualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mew ujudkan Birokrasi P emerintaha n yang Adaptif dan Melayani	-		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026/26	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	-		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	-	-	220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	-		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	-		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						900.000.000,00							990.000.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-			-	900.000.000,00						-	990.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Birokrasi P emerinta n yang Adaptifdan Melayani	-	-	220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				2 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Birokrasi P emerinta n yang Adaptifdan Melayani	-		220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	180.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Birokrasi P emerinta n yang Adaptifdan Melayani	-	-	198.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Birokrasi P emerinta n yang Adaptifdan Melayani	-		198.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			-	420.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Birokrasi P emerinta n yang Adaptifdan Melayani	-	-	462.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				2 Dokumen	220.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan an yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Birokrasi P emerinta n yang Adaptifdan Melayani	-		242.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						ELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			ARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	-		220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	-	-	110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kepahiang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Kolaboratif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	-		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	JUMLAH							7.690.482.868,00						8.148.500.000,00		